

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP OBJEK SEWA BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN

(Studi Pada PT Federal International Finance Cabang Palu)

Ahmad Alif/ STB: D 101 11 387

Pembimbing:

1. Dr. Benny Diktus Yusman, SH.,MH
2. Vivi Nur Qalbi, SH.,MH. SH.MH

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penggelapan terhadap objek jaminan fidusia yang termasuk tindak pidana di PT Federal International Finance Cabang Palu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimanakah cara melakukan kejahatan terhadap benda-benda yang menjadi objek sewa beli di lembaga pembiayaan PT Federal International Finance dan bentuk pertanggungjawaban pidana debitur yang menggelapkan benda-benda obyek sewa beli di Lembaga PT Federal International Finance. Meode penelitian yaitu normatif-empiris.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Kejahatan terhadap benda yang menjadi objek sewa beli di lembaga pembiayaan PT Federal International Finance dengan cara melakukan kejahatan terhadap benda yang menjadi objek sewa beli, dengan cara mengalihkan barang kredit pada pihak lain tanpa persetujuan, dengan cara menjual, menggadaikan atau menyewakan, dengan cara melakukan kredit atas nama, membawa lari barang kredit ke luar daerah, mengambil sebagian atau mengurangi barang yang di kredit semuanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT Federal International Finance. dan Pertanggungjawaban pidana terhadap adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga terjadi pergesaran dari hukum perdata menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Disarankan lembaga pembiayaan harus lebih selektif dalam memberikan kredit kepada para calon debitur yang ingin mengajukan kredit, sebab kredit yang akan dijalankani tidaklah dalam waktu singkat, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggelapan Barang Objek Sewa Beli

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta

pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan adalah di bidang pembiayaan, khususnya pembiayaan

barang elektronik, kendaraan bermotor dan gadai dengan jaminan surat-surat kendaraan.

Adanya lembaga pembiayaan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana, memiliki barang elektronik dan kendaraan dengan mudah. Seperti yang terjadi di Kota Palu, terjadi kepadatan lalu lintas karena banyaknya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan luas jalan yang tidak mengalami penambahan. Kepadatan mencapai puncaknya pada jam-jam sibuk, terutama pada saat orang berangkat ke tempat kerja, pulang kerja.

Kota Palu menjadi kota tujuan pendatang, perdagangan, pusat pendidikan, perindustrian dan sarana transportasi, sehingga laju pertumbuhan penduduk berjalan sangat cepat. Dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan tingginya tingkat mobilisasi menyebabkan permintaan terhadap alat transportasi pun meningkat, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum khususnya kendaraan roda dua dan empat sehingga membuka peluang usaha dalam sektor pembiayaan.

Bagi dealer-dealer atau penyalur kendaraan bermotor dan lembaga pembiayaan, situasi ini sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan. Untuk pembelian sepeda motor baru dan

bekas, fasilitas kredit bunga ringan serta uang muka di bawah satu juta telah menjadi faktor pemikat yang mendorong konsumen mendatangi dealer sepeda motor produksi terbaru. Semakin banyaknya peminat kendaraan bermotor, membuat dealer terus berupaya memberikan fasilitas pembiayaan hingga ke motor bekas dengan fasilitas kredit murah.

Dalam pembelian secara kredit ini, mempergunakan dokumen kontrak. PT Federal International Finance (FIF) Melalui perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian kontrak, dalam sekejap konsumen dapat segera dan dengan mudah mendapatkan sepeda motor yang diinginkannya. Konsumen hanya perlu membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian sewa beli yang sudah dibuat dan dipersiapkan oleh pihak dealer/pelaku usaha sebelumnya. Namun, tidak banyak konsumen dan lembaga pembiayaan yang menyadari adanya konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan¹.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam

¹ Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. Citra Aditya Bakti. Bandung 2003, Hlm. 220

pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan adalah di bidang pembiayaan.

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan lembaga pembiayaan perdagangan dalam bidang usaha dan berbagai cara yang digunakan untuk mengamankan barang yang dikredit supaya tidak berpindah tangan, yang pada dasarnya menciptakan lebih banyak variasi sistem pemasaran barang yang telah ada. Semua ini sebagai akibat dari perkembangan kehidupan perekonomian pada umumnya dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat tetapi tidak diikuti oleh kemampuan ekonomi untuk membeli secara kontan. Pihak lembaga pembiayaan melihat perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai peluang untuk memberikan kredit dengan sistem sewa beli kepada masyarakat, disisi lain konsumen membutuhkan dana untuk mendukung kebutuhannya seperti kredit mobil, sepeda motor dan barang elektronik.

Sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan adalah sistem sewa beli, jual beli dengan angsuran atau sewa (*renting*). Sistem ini dilaksanakan dengan

cara pembeli mengangsur biaya tertentu yang telah disepakati dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai uang pembelian yang dibeli sewa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara melakukan kejahatan terhadap benda-benda yang menjadi objek sewa beli di lembaga pembiayaan PT Federal International Finance (FIF)?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana debitur dalam perjanjian sewa beli secara kredit yang menggelapkan benda-benda obyek sewa beli di Lembaga PT Federal International Finance (FIF).

II. PEMBAHASAN

A. Kejahatan Terhadap Objek Sewa Beli Di Lembaga Pembiayaan PT Federal International Finance (FIF)

Banyaknya lembaga pembiayaan yang mempromosikan produknya melalui program kredit memberikan daya tarik tertentu kepada calon pembeli. Kemudahan yang diberikan pihak pemilik barang yang telah bekerjasama dengan lembaga

pembiayaan dapat dilihat pada ringannya syarat yang diajukan khususnya bagi calon pembeli secara kredit. Calon pembeli hanya di minta untuk menunjukkan identitas diri (KTP), Keterangan Kartu Keluarga, rekening listrik serta keterangan lainya yang dapat menguatkan persetujuan kepemilikan barang kredit.

Selanjutnya pihak penjual dengan rekanannya yaitu lembaga pembiayaan melakukan survei terhadap calon pembeli, apabila dianggap memenuhi kriteria serta syarat-syarat yang diajukan maka calon dalam waktu yang relatif cepat akan memiliki barang yang diinginkan.

Adanya kemudahan dan ringannya syarat yang dijadikan kriteria bagi calon pembeli, ternyata menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya pembeli yang secara otomatis dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan barang dan perkembangan lembaga pembiayaan, sedangkan dampak negatif yang sering terjadi adalah memberikan peluang atau potensi bagi sebagian pembeli melakukan tindakan-tindakan melawan

hukum yaitu tindak pidana penggelapan atau penrusakan barang.

Banyaknya kasus-kasus penggelapan barang kredit yang terjadi oleh pembeli (kreditur) sangatlah merugikan bagi pihak lembaga pembiayaan. Yang menjadi pemikiran sekarang adalah dengan meningkatnya tindak pidana penggelapan barang kredit yang menjadi jaminan lembaga pembiayaan. Dengan kerugian dari pihak penjamin oleh tindakan pembeli yang melakukan penggelapan, permasalahan lainnya adalah sulitnya penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.

Hal ini dikarenakan pada pelaporan awal oleh pihak yang dirugikan merupakan permasalahan hukum perdata yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati, namun dengan adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga yang berdasarkan badan hukum menjadikan kasus tersebut bias, karena terjadi pergesaran dari hukum perdata menjadi hukum pelanggaran tindak pidana.

Pada dasarnya, aspek hukum pidana dan hukum perdata memiliki

peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi setiap perjanjian. Namun, didalam praktek hukum keperdataan atau hukum kontrak sering terjadi para pihak merasa kurang puas menggunakan solusi melalui saran hukum keperdataan dan arbitrase sehingga berupaya untuk meminta bantuan atau menggunakan sarana hukum pidana².

Pada prinsipnya penjualan barang sistem kredit kebanyakan kendaraan bermotor yang berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak pembiaya berdasarkan akta jual-beli di mana dalam akta ini kreditur memiliki hak sepenuhnya terhadap barang yang di kuasai namun barang tersebut masih milik sepenuhnya pihak penjamin.

Dalam menjalankan aktivitas penjualan secara kredit PT FIF Cabang Palu, akan banyak resiko, baik perdata maupun memenuhi unsur pidana yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan wawancara PT Federal International Finance (FIF) Cabang Palu, bahwa konsumen tidak membayar kredit barang yang telah jatuh tempo

dan bunganya selama 3 (tiga) bulan maka eksekutor akan melakukan penarikan terhadap barang yang dikredit. Fakta dilapangan banyak pelaku yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya ketika pihak eksekutor menanyakan keberadaan barang yang dikredit. Alasan yang umum yang sering diungkapkan adalah

- 1) Barang yang dikredit sedang diperbaiki oleh teman, keluarga;
- 2) Pelaku melakukan kredit atas nama, jadi tidak tahu menahu tentang keberadaan barang kredit tersebut;
- 3) Telah melakukan pengalihan kredit atau over kredit pada pihak lain;
- 4) Pelaku sering merusak atau menghilangkan / menyembunyikan sebagian onderdil barang kredit dengan sengaja.

Penyelesaian di Kepolisian dilakukan apabila pihak kreditur tidak mau berdamai dengan PT Federal International Finance Cabang Palu,

² Moeljatno. Asas-asas hokum pidana . bina aksara. Jakarta. Hlm.85

dengan terpaksa membuat laporan dan pengaduan pengrusakan/penggelapan/pemalsuan identitas dalam bermohon kredit ke pihak berwajib berjumlah 4 kasus (7.15%). Selanjutnya dalam tahap pemeriksaan di Kepolisian dengan mengetahui adanya sanksi pidana terhadap perbuatannya, pihak kreditur merasa takut sehingga ingin menyelesaikan atau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ganti rugi. Menurut Bagian supervisi PT Federal International Finance Cabang Palu bahwa.

B. Pertanggungjawaban Pidana Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Secara Kredit Yang Menggelapkan Benda Obyek Sewa Beli

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tetapi tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan, ada hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian dan mengakibatkan Wanprestasi. Tidak ada prosedur yang khusus terhadap eksekusi obyek perjanjian, karena itu jika ada sengketa

haruslah beracara lewat pengadilan dengan prosedur biasa. Ini tentunya akan banyak menghabiskan waktu dan biaya, di samping hasilnya yang kurang memuaskan tidak seperti yang diharapkan.

Pada awalnya sewa beli adalah masalah perjanjian dalam ruang lingkup hukum perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi perkara pidana karena adanya etiket tidak baik dari pembeli, dimana barang yang menjadi objek sewa beli, dijual, dialihkan atau bahkan dibawa lari dan barang sudah diganti atau ditukar.

Bahwa didalam perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa adalah adanya penegasan penyerahan barang yang menjadi objek sewa beli untuk dipinjam pakai saja. Disini berarti kepemilikan objke sewa beli masih tetap berada di tangan penjual sewa, maka konsekwensinya pembeli sewa tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain tanpa seijin pihak penjula sewa. Kemudian apabila ternyata hal tersebut dilanggar oleh pihak pembeli sewa, maka ia dapat dikenakan atau pelanggaran pidana yaitu Pasal penggelapan.

Penggelapan barang yang menjadi objek kredit sangat merugikan lembaga pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit terhadap barang di perusahaan pembiayaan dengan system pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Tetapi dalam kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat menjadi yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran. Bahkan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan barang yang menjadi objek kredit tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan ini dikatakan sebagai kejahatan penggelapan yang sangat merugikan perusahaan pembiayaan.

Adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga yang berdasarkan badan hukum menjadikan kasus tersebut bias, karena terjadi pergesaran dari hukum perdata menjadi hukum pelanggaran tindak pidana. Timbulnya sengketa pelanggaran hukum antara kreditur dan penjamin

dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana pengelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang di ancam karena pengelapan Dengan pidan paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Karena dalam prakteknya perbuatan yang dikemukakan di atas merupakan suatu penggelapan dan pelanggaran tindak pidana di mana dalam sistematisnya barang yang dikredit yang diambil dari toko / dealer telah mengalami proses yaitu kesepakatan dengan akta jual beli sehingga muncul pihak ketiga yaitu lembaga pembiayaan namun dalam perjanjian dengan akta jual-beli sebelum terjadi pelunasan barang yang menjadi objek sewa beli tersebut barang tersebut

masih dalam kekuasaan dan pengawasan pihak pembiayaan dan si pembeli hanya memiliki hak pakai atau hak menikamti, namun terjadi penyalahgunaan hak di mana barang yang menjadi objek sewa beli yang belum terjadi pelunasan oleh pembeli pertama dijual tanpa melakukan penyerahan hak pembayaran terhadap pelunasan pembayaran kepada pembeli kedua dan selanjutnya sehingga timbul suatu wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian jual-beli di antara ke dua belah pihak (pembeli pertama dengan badan pembiayaan).

Hal tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana Pasal 372 KUHP tentang penggelapan meski dalam kasus penggelapan yang dilakukan oleh kreditur merupakan tindak pidana yang berawal dari perdata yaitu mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan hak dan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati namun dengan tindakan yang menjual atau mengambil sebagian, memindahtangankan, membawa lari barang kredit yang masih pada masa kredit merupakan suatu pelanggaran pidana penggelapan.

Menurut Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) menyatakan bahwa :

Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Konsekuensi hukum dari perjanjian semacam ini adalah hak dan kewajiban atas barang tersebut masih berada pada yang menyewakan sebagai pemilik barang, karena hak milik belum beralih. Oleh karena statusnya hanya selaku penyewa, maka penyewa dilarang mengalihkan benda yang dikuasainya. Penyewa terancam dengan

pidana penggelapan jika ia sampai berani menjualnya.

Selanjutnya Menurut Pasal 1 huruf (b) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 34/KP/II/80 menjelaskan:

Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Dengan demikian, maka si pembeli seketika sudah menjadi pemilik dan kekurangan pembayarannya kepada penjual akan dianggap sebagai hutang. Jika sewa beli, maka dilarang mengoperkan sewa tanpa persetujuan yang menyewakan. Apabila diperbolehkan oleh yang menyewakan,

barulah dapat mengalihkan sewa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

Unsur Pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut³:

Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Menurut Lamintang,⁴ Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki

³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Stora Grafika, Jakarta, 1983, Hlm. 622

⁴ Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hlm. 105

adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

Unsur Kedua Pasal 372 KUHP ialah “menguasai atau memiliki secara melawan hukum” Pengertian memiliki secara melawan hukum dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959⁵, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atau benda itu. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, “memiliki yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.

Unsur Ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu “suatu benda”, menurut Sugandhi adalah sebagai berikut⁶ :

Yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum) dapat pula dikenakan Pasal ini.

Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya.

Unsur ke Empat Pasal 372 KUHP ialah “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh

⁵ **Ibid**, Hlm. 106

⁶ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Jakarta, 1980, Hlm. 376

Sianturi bahwa: “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku.

Selanjutnya menjelaskan bahwa⁷:

Barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti :

- a. Peminjaman,
- b. Penyewaan,
- c. Sewa-beli,
- d. Penggadaian,

- e. Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh sipenjual,
- f. Penitipan,
- g. Hak retensi, dan lain sebagainya tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya:

- 1) Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya;
- 2) Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di mobil seseorang ketika ia bertamu;
- 3) Terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya; dan lain sebagainya

Hal tersebut berarti bahwa apabila barang tersebut secara keseluruhan miliknya sendiri, maka tidak dapat dikatakan bahwa barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

⁷ Sianturi **Op.Cit.** Hlm. 622

Unsur Kelima Pasal 372 KUHP, yaitu “berada padanya bukan karena kejahatan”, dijelaskan oleh Lamintang bahwa⁸:

Menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu”. Jadi jika barang tersebut berada di tangannya melalui mengambil dari orang lain tanpa hak, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan penggelapan melainkan melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pencurian.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap terjadinya penggelapan atas objek barang yang masih dalam kredit, penulis mengetengahkan contoh kasus yang terjadi pada pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Palu pada Tahun 2011 sebagai berikut:

Terdakwa yang bernama Udin pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Kankung Palu Barat No. 30c, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa satu unit sepeda

Honda warna hitam tanpa: Shock depan, cakram depan dan belakang, lampu depan, speedometer, batok lampu depan, saringan hawa, tutup magnet, kipas magnet, sebeng (anti lumpur), lidah tengah, lampu belakang, body, sayap depan, palang sadel belakang, tutup rantai, tromol cakram, satu unit sepeda motor Honda warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu PT Federal International Finance (FIF) Cabang Palu, Jalan Danau Poso No. 12 A, Ujuna. Kendaraan tersebut yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke PT Federal International Finance (FIF) Cabang Palu untuk mengajukan kredit satu unit sepeda motor Honda warna hitam yang masih dalam keadaan baik lalu pengajuan kredit tersebut disetujui.
- Kemudian untuk bulan berikutnya yaitu tanggal Senin 20 Juni 2013 untuk

⁸ Lamintang, Op.Cit. Hlm. 106

pembayaran cicilan I terdakwa tidak dapat membayar lalu pada hari Rabu 22 Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB, pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Palu datang ke rumah terdakwa untuk menarik sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak ada di rumah terdakwa namun berada di rumah teman terdakwa.

- Selanjutnya pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Palu melihat keadaan sepeda motor tersebut yang sudah dalam keadaan diganti, bukan bawaan aslinya, yaitu berupa: Shock depan, cakram depan dan belakang, lampu depan, speedometer, batok lampu dengan, batok lampu depan bawah, saringan hawa, tutup magnet, kipas magnet, sebang (anti lumpur), lidah tengah, lampu belakang, body, sayap depan, palang sadel belakang, tutup rantai, tromol cakram.

- Kemudian pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Palu merasa keberatan dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya terdakwa berhasil di tangkap berikut barang buktinya dan diserahkan ke Polres Palu.

Berdasarkan hasil persidangan, terbukti melakukan penggelapan dan memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Dengan terpenuhinya ketiga unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yakni tindak pidana penggelapan. Dengan penjelasan tersebut, tentunya unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh tindakan-tindakan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dikenakan pasal penggelapan.

Tindakan dengan sengaja mengganti alat-alat kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian sewa beli

dengan mengambil keuntungan di dalamnya, sedangkan pembayarannya dalam keadaan macet dan berujung pada penarikan kendaraan oleh kreditur, merupakan tindak pidana penggelapan, sebab keadaan kendaraan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kendaraan ketika diserahkan kepada debitur.

Tindakan tersebut merupakan tindak pidana penggelapan, sebab debitur dengan sengaja dan sadar menggelapkan alat-alat kendaraan yang sebagian atau seluruhnya bukan milik debitur, dimana kendaraan tersebut tidak diperoleh melalui tindak pidana, melainkan melalui pengajuan kredit yang disetujui oleh pihak kreditur.

Debitur yang telah menggelapkan alat-alat kendaraan bermotor yang di atasnya melekat perjanjian sewa beli harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya tersebut, sebab jelas kendaraan tersebut belum sepenuhnya menjadi milik debitur sebelum pelunasannya dilakukan.

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara melakukan kejahatan terhadap benda yang menjadi objek sewa beli

sebagai berikut: Dengan cara mengalihkan barang kredit pada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT Federal International Finance, dengan cara menjual, menggadaikan atau menyewakan tanpa sepengetahuan pihak PT Federal International Finance, dengan cara melakukan kredit atas nama, membawa lari barang kredit ke luar daerah, mengambil sebagian atau mengurangi barang yang di kredit pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan perdamaian untuk mengurangi resiko kerugian pihak PT Federal International Finance (FIF) karena apabila dilanjutkan ke proses hukum kendaraan akan disita sebagai barang buki sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Bentuk Pertanggungjawaban pidana debitur dalam perjanjian sewa beli secara kredit yang menggelapkan benda obyek sewa beli, ada awalnya sewa beli adalah masalah perjanjian

dalam ruang lingkup hukum perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi perkara pidana karena adanya etikat tidak baik dari pembeli, dimana barang yang menjadi objek sewa beli, dijual, dialihkan atau bahkan dibawa lari dan barang sudah diganti atau ditukar. Adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga terjadi pergeseran dari hukum perdata menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

B. Saran

1. Sebaiknya lembaga-lembaga yang bergerak dalam usaha pembiayaan harus lebih selektif dalam memberikan kredit kepada para calon debitur yang ingin mengajukan kredit, sebab kredit yang akan dijalankani tidaklah dalam waktu singkat, namun berlangsung cukup lama, sehingga sangat dibutuhkan adanya kelayakan kemampuan melunasi hutang.
2. Debitur yang mengajukan dan menjalani sewa beli atau kredit barang, sebaiknya tidak berupaya untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara-cara tertentu, sebab tindakan debitur yang semacam itu akan diminta pertanggungjawabannya di depan hukum pidana mengenai penggelapan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku / karya ilmiah:

Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. Citra Aditya Bakti. Bandung 2003

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Stora Grafika, Jakarta, 1983,

Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989

R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Jakarta, 1980.

Moeljatno. Asas-asas hokum pidana . bina aksara. Jakarta.

B. Undang-Undang

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perjanjian Kegiatan Usaha Sewa Beli (hire-purchase)

BIODATA PENULIS



Nama	: Ahmad Alif
Tempat, tanggal lahir	: Tawau, 23 Mei, 1992
Alamat	: Jalan Srikaya II
Alamat e-mail	: lifooong23@gmail.com
No. Telp/Hp	: 085395666887